

DAFTAR ISI

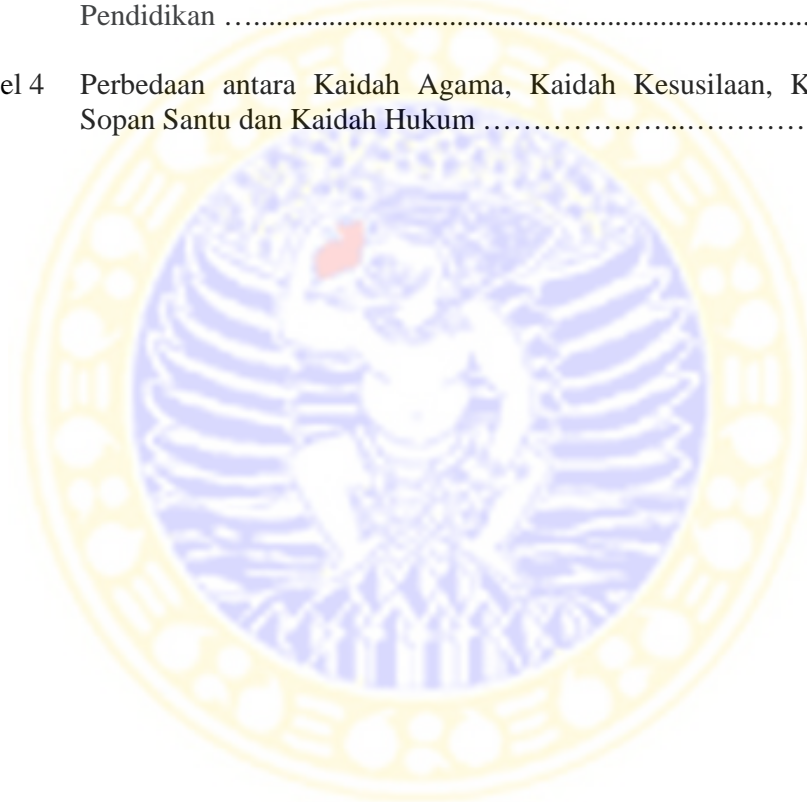
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR BAGAN	xxvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Orisinalitas Penelitian	19
F. Kerangka Konseptual	22
G. Metode Penelitian	43
1. Tipe Penelitian	43
2. Pendekatan Masalah	44
3. Sumber Bahan Hukum	46
4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	47
5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	47
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	48
BAB II: DASAR FILOSOFIS DAERAH DIBERI WEWENANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERCIRI KHAS DAERAH	51
A. Hakikat Negara Kesatuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia	52
B. Pembentukan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	68
1. Hakekat Peraturan Daerah	68
2. Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	77
C. Pembentukan Peraturan Daerah yang Didasarkan pada Ciri Khas Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	90
D. Pembentukan Peraturan Daerah yang Berciri Khas	

Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	95
E. Pembentukan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	99
F. Pembentukan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah	105
BAB III: PENGAWASAN PERATURAN DAERAH YANG BERCIRI KHAS DAERAH	110
A. Dasar Hukum Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah	110
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	110
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	114
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	121
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	124
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	128
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	133
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah	135
B. Parameter Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah.....	148
1. Parameter Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah	149
a. Parameter Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi	149
b. Parameter Bertentangan dengan Kepentingan Umum	166
c. Parameter Bertentangan dengan Kesusilaan	177
2. Parameter Pengawasan oleh Lembaga Yudisial	183
a. Parameter Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi	189
b. Parameter Pembentukan Peraturan Daerah Tidak Memenuhi Ketentuan yang Berlaku	200

BAB IV: AKIBAT HUKUM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH YANG BERCIRI KHAS DAERAH BAGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH	216
A. Akibat Hukum Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah yang Dibentuk Berdasarkan Ciri Khas Daerah	217
1. Waktu Berlakunya Keputusan Pembatalan oleh Pemerintah	217
2. Konsekuensi (Pelaksanaan) Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah yang Berciri Khas oleh Pemerintah Bagi Pemerintah Daerah dan Bagi Masyarakat	222
3. Analisa Kasus Pembatalan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah oleh Pemerintah	232
B. Akibat Hukum Pengawasan Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah	236
1. Waktu Berlakunya Putusan Pembatalan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah oleh Mahkamah Agung	236
2. Konsekuensi (Pelaksanaan) Putusan Pembatalan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah oleh Mahkamah Agung Bagi Pemerintah Daerah dan Bagi Masyarakat	242
3. Analisa Kasus Pembatalan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah oleh Mahkamah Agung	247
BAB V: PENUTUP	253
A. Kesimpulan	253
B. Saran	259
DAFTAR BACAAN	262

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbedaan Batal, Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan	43
Tabel 2 Perbandingan Wewenang Pengawasan Peraturan Daerah	141
Tabel 3 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota pada Bidang Pendidikan	161
Tabel 4 Perbedaan antara Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Sopan Santu dan Kaidah Hukum	179



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Pembatalan Peraturan Daerah menurut Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	228
Bagan 2 Pembatalan Peraturan Daerah menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	229



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan dan Konsumsi Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

